

Kualitas Dipertanyakan, Proyek Jalan Pekkae–BTS Soppeng Mulai Rusak

Muh Hasyim Hanis, SE, S.Pd, C.L.E - BARRU.TELISIKFAKTA.COM

Jan 5, 2026 - 20:16



Proyek yang berada di Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, tersebut diduga mengalami kerusakan dini meski baru selesai dikerjakan.

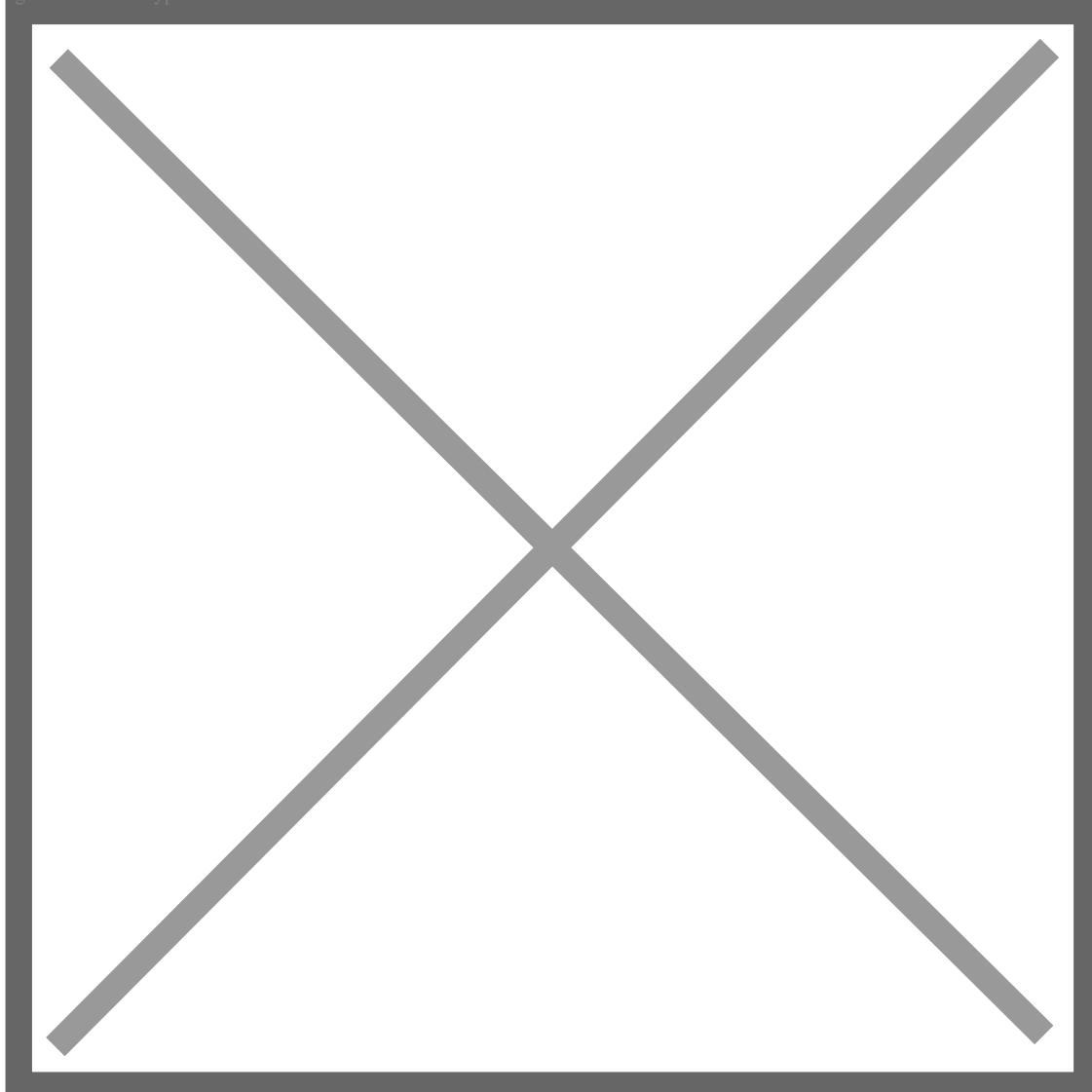
BARRU— Proyek Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Ruas Pekkae–BTS Kabupaten Soppeng yang berada di wilayah Kabupaten Barru mendapat sorotan dari masyarakat.

Proyek yang berada di Desa Lombo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, tersebut

diduga mengalami kerusakan dini meski baru selesai dikerjakan.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi aspal mulai mengalami retak-retak dan berlubang di sejumlah titik.

Image not found or type unknown



Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga terkait kualitas pekerjaan, mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.

Diketahui, proyek ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nilai kontrak sebesar Rp [7.686.088.000](#).

Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Nomor Kontrak HK.0201/PPK3/APBN/IJD-Pekkae/706 tertanggal 25 November 2025, dengan lingkup pekerjaan pengaspalan sepanjang 2,143 kilometer.

Adapun penyedia jasa dalam proyek ini adalah CV Tunas Karya, konsultan supervisi PT Bintang Inti Rekatama, serta KSO PT Indo Pratama Sari.



Salah seorang warga, Erwin, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi jalan tersebut.

“Secara kasat mata aspal sudah terlihat retak seribu dan mulai berlubang di beberapa titik. Padahal usia pekerjaan masih tergolong baru,” ujarnya. (05/1/2026).

Warga menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian serius dari pihak terkait, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta instansi teknis lainnya.

Terlebih saat ini telah memasuki musim hujan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan jika tidak segera ditangani.



Masyarakat berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu pekerjaan dan pengawasan proyek, serta perbaikan secepatnya apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

Hal ini dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab penggunaan anggaran negara dan upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Hingga Pemberitaan ini diterbitkan, pihak pelaksana atau kontraktor proyek tersebut belum ada hasil konfirmasi.

(red-jni)